

KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh :

Amini, Nina Widowati

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos
1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis kinerja yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan dimensi-dimensi yang mendukung maupun menghambat kinerja dinas tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori administrasi publik dan lima dimensi kinerja yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, keefektifan biaya, dan akuntabilitas dengan desain penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informasi pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah daerah yang baik di Jawa Tengah masih kurang optimal terutama dari segi keefektifan biaya, di temukan masalah seperti terbatasnya sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang menunjang kinerja. Meskipun demikian, kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah didukung oleh program yang kegiatan-kegiatannya telah terjadwal, adanya diklat dan bintek untuk meningkatkan kualitas pegawai, kesesuaian program dengan visi dinas, pemberian rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan SKPD, kedisiplinan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaporkan kinerjanya, adanya upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, hingga adanya website Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk transparansi kinerja kepada publik.

Mengenai masalah tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan seperti meningkatkan kualitas sumber daya yang ada, penambahan usulan anggaran dan sarana prasarana agar lebih memadai.

Kata kunci : Kinerja, Kuantitas, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan dimasa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang

bersalah. Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang. Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* khususnya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka kinerja atas

penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Salah satu institusi pengawas daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Kedudukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pengawasan yang dipimpin seorang Inspektur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris daerah (Sekda).

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Inspektorat provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan, dan masyarakat;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- d. evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dan berikut adalah visi dan misi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah itu sendiri:

Visi : Visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah "**Menjadi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah daerah yang baik di Jateng**".

Misi : Untuk mewujudkan visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan kedudukan dan peran Inspektorat
2. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan
3. Membangun kerjasama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan instansi lainnya

Berdasarkan visi dan misi tersebut seharusnya Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD serta memperbaiki kesalahan kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan kesalahan

tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Dibentuknya Pengawas Daerah (Inspektorat Wilayah) bertujuan untuk mewujudkan *good and clean governance*, akan tetapi pada kenyataannya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Masih terdapat masalah yang ditemukan seperti kecurangan, korupsi yang terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan belum maksimalnya kinerja para pengawas yang dapat menimbulkan kerugian material yang cukup besar.

Selain data masalah yang ditemukan seperti kecurangan, korupsi yang terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan belum maksimalnya kinerja para pengawas yang menimbulkan pertanyaan tentang kinerja inspektorat, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menunjukkan beberapa data belum tercapainya pencapaian sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Data yang menunjukkan kurang maksimalnya kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu :

- **Prosentase Hasil Pemeriksaan yang Ditindak Lanjuti**, tahun 2013 ditargetkan persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti sebesar 95%, dapat dicapai sebesar 79,30% atau 77,79% dari target. Hal ini berarti capaian target kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 untuk sasaran 1.2 di bawah target yang telah ditetapkan.
- **Jumlah Aset yang Terjamin Dalam Perlindungan Asuransi**. Hasil pengukuran pencapaian target hasil (outcome) tahun 2013 yang direncanakan 100% aset Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terlindungi dalam jaminan asuransi, hanya dapat direalisasikan sebesar 90% di bawah target yang telah ditetapkan.
- **Jumlah Obyek Pemeriksaan yang Dilakukan Pengawasan**. Tahun 2013, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan

kegiatan pengawasan pada 95 (sembilan puluh lima) obyek pemeriksaan atau target outcome tercapai 100%, sedangkan LHP yang diterbitkan sejumlah 186 (seratus delapan puluh enam) LHP atau target output tercapai 189,47%. Dalam pencapaian target tahun 2013 hampir tidak ada kendala/hambatan. Namun demikian tingginya angka penyimpangan pencapaian target perlu dilakukan evaluasi. Penetapan target keluaran berupa jumlah LHP dan target hasil (outcome) berupa jumlah Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan organisasi.

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah di tetapkan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana kinerja Inspektorat Provinsi Jawa tengah, perlu di lakukan penilaian kinerja untuk mengetahui seberapa jauh rencana kerja telah dilaksanakan, semua ini di gunakan untuk

penyusunan rencana kerja tahap berikutnya.

Dengan melihat paparan di atas mengenai beberapa masalah dalam kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, penulis bermaksud melakukan penelitian pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan mengambil judul “KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ?
2. Apa saja dimensi-dimensi yang mendukung dan menghambat kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendiskripsikan dan menganalisis kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokoknya.

2. Mengetahui dimensi-dimensi yang mendukung dan menghambat kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

D. KERANGKA TEORI

1. Kinerja

Menurut Hasibuan (dalam Hadari Nawawi, 2006 : 64) yaitu hasil kerja yang di capai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang di bebaskan kepadanya, berdasarkan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu.

Di dalam kamus *Illustrated Oxford Dictionary* (1998:606), istilah performance menunjukkan “*the execution or fulfillment of a duty*” (pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas), atau *a person’s achievement under test conditions etc.* (pencapaian hasil dari seseorang ketika di uji, dsb) (Keban,2008:209).

Kinerja merujuk pengertian hasil, Bernardin (2001:143) menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan hasil yang di produksi (di hasilkan) atau fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-

aktivitas selama periode waktu tertentu (Sudarmanto, 2009:8).

Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku. Terkait dengan kinerja sebagai perilaku, Murphy (1990) (dalam Richard,2002) menyatakan bahwa kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja (sudarmanto, 2009:8).

Dari pendapat beberapa tokoh diatas, dapat di simpulkan bahwa kinerja merupakan suatu hasil kerja yang di capai dari seperangkat perilaku yang sesuai dengan tujuan pada periode waktu tertentu.

2. Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi adalah agregasi atau akumulasi kinerja semua unit-unit organisasi, yang sama dengan penjumlahan kinerja semua orang atau individu yang bekerja di perusahaan tersebut (Payaman, 2011:3). Menurut Bastian (2001:329) (dalam Hessel, 2005:175) kinerja organisasi sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Kinerja perusahaan atau organisasi adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang harus di capai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. (Payaman, 2011:3)

Berdasarkan pendapat tokoh di atas mengenai kinerja organisasi maka dapat di simpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu hasil kerja dari seluruh proses dan komponen yang ada dalam organisasi dalam usahanya mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.

Hasil kerja atau ketercapaian kinerja organisasi tersebut menunjukkan seberapa besar tingkat ketercapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Tingkat ketercapaian organisasi tersebut dapat di ukur dengan menggunakan ukuran maupun standar kinerja tertentu sebagai alat dalam melakukan pengukuran kinerja organisasi.

3. Dimensi Kinerja

Dimensi merupakan alat yang di gunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi tertentu. Misalnya apabila suatu hasil pekerjaan di katakan bagus, apa yang di gunakan untuk menjelaskan mengenai hal yang di sebut bagus tersebut. Dimensi kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, sehingga bentuknya cenderung kualitatif atau tidak dapat di hitung.

Dwiyanto dkk. (2002:48-49)
(dalam Hessel. 2005:176-179)
mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut :

1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktifitas pada umumnya di pahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas kemudian dirasa terlalu sempit dan *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas

dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang di harapkan sebagai salah satu dimensi kinerja yang penting.

2. Orientasi Kualitas Layanan kepada Pelanggan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang di terima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat di jadikan dimensi kinerja organisasi publik. Keuntungan utama mengguankan kepuasan masyarakat sebagai dimensi kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat di peroleh dari media massa atau diskusi publik. Karena akses informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan

relatif sangat tinggi, maka ini bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah di pergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas di masukkan sebagai salah satu dimensi kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan visi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah di tunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal

tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam menunjukkan visi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menunjuk kepada mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan publik.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kegiatan dan kebijakan organisasi publik itu konsisten dengan

kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus di nilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Bernardin dalam Sudarmanto (2009:12), juga menyampaikan 6 dimensi untuk mengukur kinerja organisasi yaitu :

1. *Quality* (Kualitas) terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna/ideal dalam memenuhi maksud dan tujuan.
2. *Quantity* (Kuantitas) terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang di hasilkan.
3. *Timeliness* (ketepatan waktu) terkait dengan waktu yang di perlukan dalam menyelesaikan aktivitas atau menghasilkan hasil kerja.

4. *Cost effectiveness* (keefektifan biaya) terkait dengan penggunaan sumber daya organisasi (orang,uang,material dan teknologi) dalam memperoleh hasil kerja.
5. *Need for supervision* terkait dengan kemampuan individu dalam menyelesaikan pekerjaan.
6. *Interpersonal impact* terkait dengan kemampuan individu dalam meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik dan kerja sama di antara sesama pekerja dan anak buah.

Berdasarkan uraian mengenai dimensi yang dapat di gunakan untuk mengukur kinerja diatas, maka untuk mengetahui pencapaian kinerja pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan di ukur dengan menggunakan dimensi yang sesuai dengan kondisi dan berorientasi pada kinerja organisasi yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, keefektifan biaya dan akuntabilitas yang telah di lakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

E.METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai BPPT Kota Semarang yang dipilih dengan teknik *snowball sampling* dan melakukan *cross check* pada *website* dan data di internet dengan teknik *triangulasi*. Sumber data yang digunakan adalah data primer data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan informan dan data sekunder berupa dokumentasi yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mudah dipahami. Selanjutnya, menguji kualitas data dengan teknik triangulasi data dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu

sehingga diperoleh hasil yang mudah dipahami oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari informan.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

1. Kualitas

Program kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah disesuaikan dengan visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun telah disesuaikan dengan visi Gubernur tahun 2013-2015, sehingga visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai dan sinkron dengan visi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah diuraikan dalam 3 misi. Program kerja dan kegiatan telah disusun sesuai dengan visi misi tersebut. Terdapat 6 program dan 32 kegiatan yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH dengan 6 kegiatan, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

dengan 1 kegiatan, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 12 kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 9 kegiatan, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1 kegiatan, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dengan 1 kegiatan. Melalui kesesuaian program dengan visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Upaya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan dan pembinaan SKPD di Provinsi Jawa Tengah telah berjalan efektif. Hal ini dilakukan dengan pemberian Rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan kepada SKPD dan juga memberikan sosialisasi-sosialisasi guna pencegahan terhadap SKPD untuk tidak melakukan penyelewengan dan kesalahan-kesalahan dalam kinerjanya. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan dan pembinaan di SKPD Provinsi Jawa

Tengah telah melakukan upayanya sebaik mungkin agar tidak terjadi penyelewengan dan kesalahan di SKPD sehingga terwujudlah pemerintahan daerah yang baik di Provinsi Jawa Tengah.

Pemberian informasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat telah dilakukan dengan terbuka melalui website Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu inspektorat.jatengprov.go.id yang mencantumkan kegiatan-kegiatan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan berkaitan dengan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, tetapi untuk hal yang sifatnya detail temuan atau rekomendasi pemeriksaan, atau ada kasus-kasus itu tidak bisa kita sampaikan karena di khawatirkan akan terjadi kesalahan pemahaman masyarakat. Hal-hal tersebut di rasa telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

2. Kuantitas

Persentase capaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

seluruhnya telah dapat mencapai 100%. Pencapaian ini di dukung dengan terjadwalkannya program-program Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang di uraikan melalui kegiatan-kegiatan sehingga dengan kegiatan yang terjadwal, para pegawai dapat melakukan tugasnya dengan rapi dan terstruktur serta dengan adanya dukungan dari bintek dan diklat yang membuat pegawai di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah walaupun beban kerja lebih banyak dan tidak sesuai dengan kuantitas pegawai yang ada namun para pegawai tetap dapat melakukan pekerjaannya dengan optimal dan membuat kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tercapai seluruhnya.

3. *Timeliness* (Ketepatan Waktu)

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam pelaporan kinerja telah berusaha untuk selalu tertib dan tepat waktu. Hingga sejauh ini hal tersebut telah di laksanakan dengan tepat waktu. Laporan yang di susun di antaranya adalah laporan capaian kinerja, laporan keuangan akhir tahun serta LAKIP Inspektorat

Provinsi Jawa Tengah untuk di laporkan kepada Gubernur. Laporan Juga di kirim MENPAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) dan Irjen (Inspektorat Jendral) melalui gubernur juga di laporkan tepat waktu.

4. *Cost Effectiveness* (keefektifan biaya)

Pemanfaatan sumber daya manusia (pegawai) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang ada masih terkendala pada kuantitas dan kualitas pegawai yang ada. Keterbatasan secara kuantitas mengakibatkan beban kerja pegawai banyak bahkan tidak jarang ada yang merangkap pekerjaan, dimana ketika ada satu kegiatan pemeriksaan yang belum selesai di lakukan namun ada tugas lain yang mendesak maka pekerjaan yang sedang berlangsung harus di tinggalkan sementara untuk melaksanakan tugas baru yang mendesak. Keterbatasan secara kualitas mengakibatkan pegawai masih menggunakan mindset lama dalam melakukan pemeriksaan dimana mereka harus menemukan temuan dan kesalahan, padahal tugas

yang seharusnya di lakukan adalah pendampingan.

Penggunaan sumber daya anggaran yang ada masih terkendala pada terbatasnya anggaran untuk penambahan kendaraan operasional. Keterbatasan anggaran ini di karenakan belum adanya bantuan aliran dana dari pihak yang berwenang atau yang membawahi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah termasuk gubernur namun biaya yang terbatas tersebut dapat di alokasikan seoptimal mungkin oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Penggunaan sarana prasarana dan teknologi yang ada sudah optimal, tetapi masih kurang efektif untuk menunjang kinerja. Hal ini di sebabkan karena masih adanya kekurangan pada kendaraan operasional. Dukungan sarana prasarana dan teknologi yang masih belum memadai tersebut menjadikan kendala untuk lebih menunjang kinerja.

5. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan secara rutin setiap tahunnya mempertanggungjawabkan kinerja yang dihasilkannya dalam bentuk pelaporan. Laporan kinerja terdiri atas laporan capaian kinerja dan laporan keuangan, keduanya telah rutin dan tertib dipertanggungjawabkan ke Gubernur sebagai pihak di atasnya maupun ditingkat pusat yaitu MENPAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) dan Irjen (Inspektorat Jendral) melalui Gubernur.

Transparansi atas kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan melalui *website* Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Segala bentuk laporan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berupa laporan capaian kinerja dan laporan keuangan dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui *website* yang telah disediakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

B. Dimensi-Dimensi yang Mendukung dan Menghambat Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

1. Dimensi Pendukung Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Dimensi-dimensi yang mendukung kinerja yang di tinjau dari dimensi kualitas yaitu kinerja yang sesuai dengan tujuan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah di dukung dengan:

a. Kesesuaian Program dengan Visi Dinas

Penyusunan program yang di susun Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah di sesuaikan dengan visi dinas, sehingga tidak ada program yang tidak sesuai dengan visi dinas. Kesesuaian program dengan visi dinas ini akan mendukung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam menciptakan kinerja yang efektif dan efisien, semua pekerjaan di lakukan untk mendukung tercapainya visi dinas.

b. Pemberian Rekomendasi Terhadap Hasil Pemeriksaan Kepada SKPD

Rekomendasi di gunakan untuk memberikan saran kepada SKPD untuk melakukan apa yang

seharusnya, dengan melihat apa yang senyatanya. Setelah di sarankan ada rekomendasi, maka SKPD tersebut menidaklanjuti apa yang di sarankan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Hal ini di rasa efektif, karena setelah di lakukan pengawasan, SKPD tersebut tahu akan kesalahannya dan segera memperbaiki terkait dengan kesalahannya. Upaya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan dan pembinaan di SKPD Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan termasuk dengan memberikan sosialisasi-sosialisasi misalnya dari KPK. Upaya ini merupakan salah satu bentuk pencegahan kepada SKPD agar tidak terjadi penyelewengan dalam kinerjanya.

2. Dimensi Kuantitas

Dimensi-dimensi yang mendukung pencapaian target kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah :

a. Program yang Kegiatannya telah Terjadwal

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyusun program-program kerja yang telah di sesuaikan dengan tujuan yang hendak di capai, kemudian pada setiap program di jabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang di lengkapi dengan target capaiannya. Target yang ada pada setiap program dapat di gunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa besar program itu telah tercapai. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pemeriksaan ke SKPD melakukan pedjadwalan dan telah terprogram sehingga target-target pemeriksaanpun setiap bulannya dapat tercapai dan laporan hasil pemeriksaan tersebut di terbitkan setiap satu bulan setelah melakukan pemeriksaan.

b. Adanya Diklat dan Bintek untuk Meningkatkan Kualitas Pegawai

Personil yang *qualified* di dapatkan dengan adanya diklat, bintek, dan pelatihan-pelatihan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan yang di harapkan. Hal tersebut telah di laksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

untuk meningkatkan kualitas pegawai sehingga walaupun dengan beban kerja yang lebih, pegawai tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal dengan hasil kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah targetnya dapat tercapai semua.

3. Dimensi Ketepatan Waktu

Dimensi ketepatan waktu dalam hal ini adalah ketepatan waktu dalam pelaporan kinerja. Ketepatan waktu yang telah di laksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah di dukung oleh Kedisiplinan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaporkan kinerjanya. Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah di tinjau dari kriteria ketepatan waktu dalam melaporkan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang di capainya telah di laksanakan dengan tertib dan tepat waktu. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam menciptakan ketepatan waktu pelaporan kinerja telah di dukung dengan kedisiplinan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk selalu tertib melaporkan kinerjanya.

4. Dimensi Akuntabilitas

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam menciptakan kinerja yang optimal di tinjau dari dimensi akuntabilitas telah di dukung dengan adanya dukungan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk menciptakan organisasi publik yang akuntabel dan transparan. Pertanggungjawaban dan transparansi di maksudkan agar segala kegiatan yang di lakukan organisasi publik hasilnya dapat di pertanggungjawabkan dan diketahui oleh semua pihak termasuk masyarakat sebagai pihak yang di penuhi kebutuhannya.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan pertanggungjawaban dan transparansi capaian kinerja juga telah di dukung dengan adanya *website* Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan dan memperbaharui segala capaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya *website* Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang dapat di akses pada Inspektorat.jatengprov.go.id

mendorong Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk selalu tertib melaporkan kinerja yang telah di capainya, sehingga mendukung terciptanya kinerja yang optimal dari segi akuntabilitas.

2. Dimensi Penghambat Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

1. Keterbatasan Sumber Daya Organisasi

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih terkendala dengan terbatasnya sumber daya organisasi tersebut baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah pegawai yang di miliki masih terbatas dan mindset pegawai yang melakukan tugas pemeriksaan masih menggunakan mindset lama sehingga menjadikan pemanfaatannya kurang efektif untuk lebih menunjang kinerja. Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pekerjaannya, karena keterbatasan anggaran untuk pembelian kendaraan operasional sehingga menjadikan kinerja organisasi tidak optimal. Dukungan sarana prasarana dan teknologi yang

juga masih belum memadai juga menghambat Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai kinerja. Sarana prasarana masih terbatas pada kurangnya jumlah kendaraan operasional untuk tugas pemeriksaan. sarana dan prasarana yang belum memadai menjadikan kurang maksimal dalam mendukung pekerjaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti mengenai Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih kurang optimal. Hal ini dapat terlihat dari dimensi-dimensi yang di gunakan oleh peneliti untuk mengetahui kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu terdapat empat dimensi yang sudah berjalan optimal yaitu kualitas, kuantitas, *timeliness* (ketepatan waktu), dan akuntabilitas, tetapi terdapat satu dimensi yaitu *cost*

effectiveness (keefektifan biaya) yang masih belum optimal karena masih di temukannya permasalahan dan kendala yang di hadapi.

2. Dimensi-dimensi yang Mendukung dan Menghambat Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

a. Dimensi Pendukung Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

1. Dimensi Kuantitas telah di dukung program-program yang kemudian di jabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang di sertai dengan target capaiannya, kegiatan-kegiatan tersebut terjadwal sehingga target-target kinerja seluruhnya dapat tercapai. Dimensi kuantitas juga di dukung dengan adanya bintek dan diklat untuk peningkatan kualitas personil.
2. Dimensi kualitas telah di dukung dengan adanya kesesuaian program dengan visi dinas serta adanya pemberian Rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan

kepada SKPD dan juga memberikan sosialisasi-sosialisasi guna pencegahan terhadap SKPD untuk tidak melakukan penyelewengan dan kesalahan-kesalahan dalam kinerjanya.

3. Dimensi Timeliness (ketepatan waktu), telah di dukung dengan kedisiplinan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaporkan kinerjanya dengan tertib dan tepat waktu.
4. Dimensi akuntabilitas, telah di dukung dengan adanya *website* Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk mentransparansikan segala bentuk laporan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat di akses oleh masyarakat dan menciptakan organisasi publik yang akuntabel dan transparan.

b. Dimensi Penghambat Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Dimensi *cost effectiveness* (keefektifan biaya), terhambat pada

terbatasnya sumber daya organisasi baik pegawai, anggaran maupun sarana prasarana dan teknologi untuk menunjang pekerjaan.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja organisasi pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah peneliti ingin memberikan rekomendasi saran yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang di miliki melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan yang harus di jalankan secara berkala agar keahlian pegawai dalam bekerja dapat meningkat sesuai harapan, pembinaan yang bertujuan untuk mengatur dan membina pegawai sebagai sub sistem organisasi melalui program-program perencanaan dan penilaian, recruitment yang bertujuan untuk memperoleh SDM sesuai klasifikasi kebutuhan organisasi dan sebagai salah satu alat organisasi dalam pembaharuan dan pengembangan, dan Perubahan

sistem yang memiliki tujuan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur organisasi.

- b. Pengusulan distribusi dana yang lebih besar unutm penambahan kendaraan operasional yaitu kendaraan roda empat yang anggarannya bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Tengah dan di ajukan ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran selanjutnya. Dana yang lebih besar untuk penambahan kendaraan operasional yaitu kendaraan roda empat tersebut diharapkan dapat memberikan ruang kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk memaksimalkan tugasnya dalam bidang pengawasan dan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Ibrahim, Iman. 2009. Pokok-pokok Administrasi Publik dan

- Implementasinya. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Miles dan Hubemen. 2007. *Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru)*. Jakarta : UI Press.
- Moehariono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2006. *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Payaman. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba empat.
- Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sembiring. Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah)*. Bandung : Fokusmedia
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta : LP3ES.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik : Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka.

Wursanto, Ig. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta:ANDL

Sumber data :

Laporan Akuntabilitas Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (LAKIP) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018